

BAB 1

PENDAHULUAN

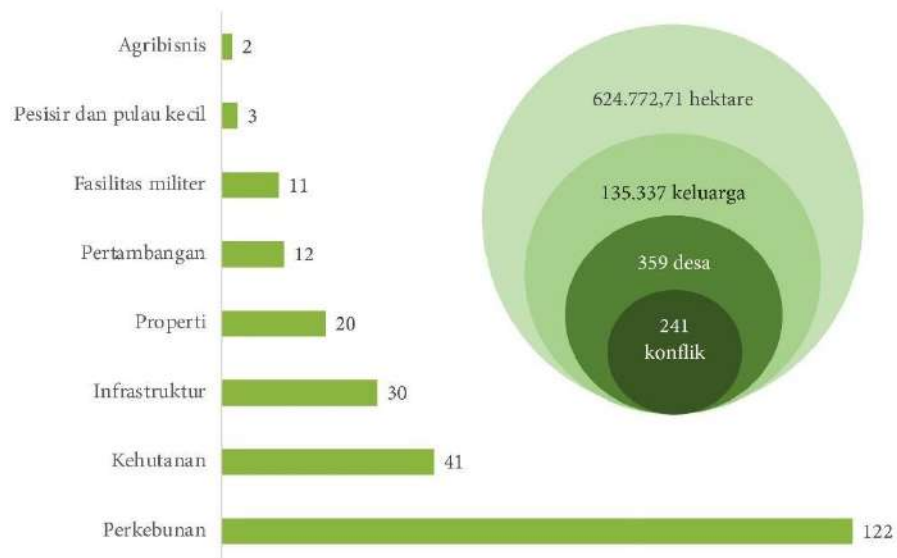
1.1 Latar Belakang

Gerakan petani adalah suatu tindakan kolektif dari petani dalam memperjuangkan hak-hak yang ia miliki. Pada konteks penelitian yang akan diteliti, akan menitikberatkan pada fenomena yang dialami petani Simalingkar yang menuntut keadilan dalam penyelesaian sengketa lahan HGU (Hak Guna Usaha) yang melibatkan PTPN 2 Simalingkar (Sei Bekala) sebagai institusi yang bersengketa dengan para petani. Para petani yang ada di Simalingkar memiliki satu pandangan bahwa lahan yang disengketa oleh PTPN 2 tersebut telah diserahkan kepada warga setempat kepemilikannya melalui SK Landreform yang dimiliki warga sejak 1982 dan telah dikelola oleh warga setempat selama puluhan tahun. Hal tersebut yang membuat warga menilai bahwa perlu adanya penyelesaian yang menguntungkan semua pihak, agar sengketa HGU tersebut dapat terselesaikan.

Dalam beberapa dekade terakhir, pada kasus-kasus konflik agraria yang ada di Indonesia menunjukkan *trend* yang cukup tinggi. Hal tersebut diakibatkan karena terhambatnya implementasi dari reforma agraria yang ada di Indonesia. Apabila dilihat pada data berikut, trend konflik agraria yang ada di Indonesia dominan berada pada sektor perkebunan. Sehingga menjadikan konflik agraria yang dilakukan oleh gerakan petani yang ada di Simalingkar ini merupakan salah satu penyumbang angka dari sekian banyak kasus konflik agraria yang ada di Indonesia. Sebab, konflik gerakan petani yang ada di Simalingkar tersebut tergolong kedalam konflik perkebunan. Data statistik tersebut dihimpun berdasarkan analisa yang diberikan oleh pihak konsorsium pertanahan agraria melalui forest digest yaitu sebagai berikut.

KONFLIK AGRARIA 2020

Rekaman konflik agraria tahun 2020 di pelbagai sektor.



Sumber: KPA, 2020



Gambar 1.1 Statistik Konflik Agraria di Indonesia¹

Secara historis, keberadaan sengketa lahan yang dialami warga yang ada di Simalingkar selama puluhan tahun menjadikan gerakan ini menjadi suatu bentuk Tindakan perlawanan. Penerapan reforma agraria dalam bentuk redistribusi lahan menjadi kepemilikan rakyat telah dituntutkan oleh warga sejak era reformasi. Adanya pengambil alihan secara sepihak oleh pihak PTPN 2 yang telah habis masa hak guna usahanya dan warga yang telah menggunakan lahan bekas perkebunan Belanda tersebut selama bertahun-tahun menjadikan upaya redistribusi lahan yang menjadi agenda reforma agraria kian rumit. Penguasaan konsesi lahan perkebunan PTPN 2 yang diisi oleh para pejabat lokal yang ditambah dengan adanya stigmatisasi bahwa kaum tani adalah golongan pemberontak dan keturunan komunis menjadikan permasalahan konflik agrarian kian meruncing di beberapa

¹ Diakses di laman dari www.kpa.go.id pada tanggal 11 November 2021 pukul 10.56

wilayah Sumatera Utara² Hal tersebut yang kemudian memunculkan Tindakan perlawanan yang dilakukan oleh para petani melalui gerakan petani, sehingga agenda reforma agraria yang menjadi kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya mampu direalisasikan dengan baik. Selain itu, lahan yang dimiliki oleh para petani yang ada di Simalingkar tersebut telah sah kepemilikannya menjadi milik petani akibat habisnya hak guna usaha yang dimiliki oleh PTPN 2. Namun, adanya klaim secara pihak yang dilakukan oleh pihak PTPN 2 atas dasar perpanjangan HGU yang telah dilakukan dan penggusuran beserta kriminalisasi yang dirasakan oleh para petani yang ada di Simalingkar menjadikan warga melakukan Tindakan perlawanan. Realisasi reforma agraria atas penyelesaian sengketa lahan tersebut menjadi pemicu munculnya gerakan yang dilakukan oleh para petani yang ada di Simalingkar.

Gerakan yang dilakukan oleh serikat petani Simalingkar pada dasarnya ingin mendorong penyelesaian sengketa lahan tersebut guna mewujudkan agenda reforma agraria yang ada di Sumatera Utara. Reforma agraria merupakan bentuk upaya dalam rangka peningkatan akses serta pemberian kepastian atas penguasaan suatu lahan. Dalam agenda reforma agraria, penyelesaian dari segala bentuk permasalahan kepemilikan lahan harus dapat diselesaikan guna mendukung percepatan pembangunan yang ada di wilayah tersebut. Khrisna Ghimire dalam analisisnya menjelaskan bahwa reforma agraria dilakukan sebagai bentuk dari perubahan-perubahan atas struktur agrarian yang membawa kemudahan akses seperti jasa, input pertanian dan juga hal-hal pendukung lainnya³. Berdasarkan defenisi tersebut, penyelesaian sengketa lahan menjadi bagian dari agenda reforma agraria yang harus dijalankan oleh pemerintah dan negara guna mending percepatan pembangunan yang ada di wilayah tersebut.

Sementara itu, terdapat beberapa data-data yang menjelaskan mengapa penerapan reforma agraria dalam kasus sengketa HGU PTPN II yang ada di Simalingkar menjadi terhambat. Wakil Menteri agrarian tata ruang menjelaskan bahwa permasalahan agraria yang ada di Sumatera Utara khususnya yang berada di

² Yahman SH DKK, Konflik Tanah Perkebunan Eks-HGU PTPN 2 di Sumatera Utara (Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Dan Kabupaten Langkat), "Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional", 2015", hlm 26

³ Beinhatnhard Limbong, Reforma Agraria, "MP Pustaka Margaritha, 2012", hlm 1.

Simalingkar terhambat penyelesaiannya akibat para petani tidak memiliki sertifikat tanah, sehingga lahan yang disengketakan berujung pada permasalahan yang amat rumit⁴. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa rumitnya penyelesaian sengketa lahan yang ada di Simalingkar terjadi akibat rumitnya permasalahan administrasi dimana berkas yang dimiliki warga sulit diidentifikasi akibat berkas tersebut merupakan berkas lama. Hal inilah yang berujung pada implementasi dari reforma agraria yang diinginkan petani di Simalingkar belum terwujud.

Munculnya Gerakan petani yang dilakukan oleh serikat petani yang ada di Simalingkar, selain disebabkan adanya penyelesaian sengketa tanah dan juga rumitnya penyelenggaraan reforma agraria atas kepemilikan lahan tersebut. Penetrasi yang dilakukan oleh aparat dan juga preman juga menjadi salah satu penyebab utama yang memunculkan pergerakan yang dilakukan oleh para petani yang ada di Simalingkar. Adanya Tindakan kekerasan dan juga penetrasi yang dilakukan oleh aparat berwajib dan juga para preman menjadikan warga resah, sehingga Gerakan ini juga sebagai wujud atas permintaan hak dari warga negara agar negara mampu melaksanakan agenda reforma agraria secepat mungkin agar tindak kekerasan dan penetrasi yang dilakukan oleh aparat tidak secara terus-menerus dirasakan oleh para petani yang ada di Simalingkar.

Gerakan yang dilakukan oleh Serikat Petani Simalingkar menjadi fokus pada penelitian ini dalam melihat setiap agenda yang terjadi pada sengketa lahan HGU yang berujung pada munculnya Gerakan. Permasalahan yang telah dirasakan oleh petani selama puluhan tahun menimbulkan reaksi dari kalangan petani untuk dapat memperjuangkan hak kepemilikannya atas tanah yang ia telah miliki dan dikelola sejak zaman colonial. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat keterlibatan aktor yang mampu memobilisasi Tindakan kolektif dari para petani untuk melakukan Gerakan tersebut. Terwujudnya agenda reforma agraria bagi petani Simalingkar menjadi tujuan bagi para petani dalam melakukan Gerakan ini guna meminta haknya atas penyelesaian sengketa lahan tersebut.

Tujuan utama dari implementasi reforma agraria adalah untuk menjamin akses serta keadilan terhadap hak-hak setiap orang atas kepemilikan lahan termasuk

⁴<https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=mqEdvIMkpVWWEIVaiXnJpYjNXFV4j/Y/SlslxunJXUhhJ2bkUUz5kfvL+DBVYco>

para petani yang ada di Simalingkar. Selama reforma agrarian belum diimplementasikan secara efektif, maka kasus sengketa lahan yang dialami oleh para petani akan kian meruncing dan akan memunculkan agenda penolakan secara kolektif yang lebih besar lagi. Akan tetapi, bila pemerintah dan juga PTPN II selaku pihak bersengketa mau menyelesaikan tuntutan reforma agrarian dari para petani dalam penyelesaian sengketa lahan. Maka agenda dari land reform yang justru akan mendukung percepatan pembangunan pada wilayah tersebut akan dapat berjalan dengan efektif dengan implementasi reforma agrarian sebagaimana yang diharapkan oleh para petani.

Pada defenisi yang dijelaskan oleh Rajendra Sigh, ia menjelaskan bahwa Gerakan terjadi Adanya suatu bentuk pengorganisasian secara kolektif yang dilakukan oleh kelompok kepentingan tertentu ⁵. Pengertian ini membawa kita kepada konstruksi dalam permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini. Gerakan yang dilakukan oleh serikat petani Simalingkar dihadirkan karena mengetahui bahwa penyelesaian sengketa lahan antara para petani Simalingkar dengan pihak PTPN II tidak berjalan sesuai dengan agenda pemerintah dalam mewujudkan reforma agraria atas permasalahan tanah yang terjadi. Oleh karena itu, kaum tani yang ada di Simalingkar menyadari bahwa pentingnya melakukan Gerakan agar konflik penyelesaian lahan tersebut tidak terjadi secara berkepanjangan. Poin kedua adalah, perasaan senasib berkepanjangan yang juga dialami para petani yang ada di Simalingkar juga menjadikan gerakan ini kian penting untuk dilakukan oleh para petani dalam menuntut hak-hak nya.

Fenomena gerakan yang dilakukan oleh serikat petani yang ada di Simalingkar juga menandakan adanya gejala dimensi proletary dan juga penempatan golongan petani pada subordinasi dibawah kalangan atas. Hal tersebut ditandai dengan tuntutan para petani yang belum menemui penyelesaian yang menjadikan para petani berada didalam posisi yang tertindas. Dalam hal ini, pemerintah khususnya badan pertanahan nasional Deli Serdang dan Sumatera Utara seharusnya dapat menjalankan mandat yang berasal dari undang-undang pertanahan agrarian. Undang-undang tersebut mengisyaratkan agar program

⁵ Sigh, Rajendra. 2010. "Gerakan Sosial Baru". (Yogyakarta). Resist Book hlm 7

reforma agrarian dapat dilaksanakan dengan optimal. Apabila agenda reforma agrarian mampu dijalankan secara optimal, secara langsung akan berdampak kepada pemajuan pembangunan dan perekonomian pada daerah tersebut. Capaian inilah yang diharapkan oleh para petani Simalingkar guna mewujudkan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut melalui gerakan yang petani lakukan.

Gerakan petani yang dilakukan oleh para petani yang ada di Simalingkar pada dasarnya merupakan bentuk ungkapan perlawanan yang dilakukan oleh para petani yang ada di Simalingkar akibat banyaknya bentuk kriminalisasi dan juga perampasan ruang hidup dari petani. Hal tersebut sesuai dengan analisis yang diberikan oleh Henry Levebre yang menjelaskan bahwa ruang hanyalah bentuk dari aktivitas produksi bagi kepentingan kapitalistik⁶. Adanya rasa ketidakpuasan atas perampasan ruang hidup yang dimiliki oleh para petani yang ada di Simalingkar akibat pemerintah yang belum mampu menemukan solusi atas penyelesaian sengketa lahan tersebut menjadikan para petani menuntut haknya melalui serikat petani Simalingkar bersatu. Hal tersebut dilakukan guna mendorong terlaksananya program reforma agraria agar penyelesaian pada sengketa HGU tersebut dapat terselesaikan. Berbagai macam pergulatan yang terjadi seperti peran dari aktor kepentingan dalam melakukan mobilisasi kolektif dari para petani serta peran pemimpin gerakan dalam membangun strategi guna mewujudkan tuntutan atas penyelesaian sengketa lahan melalui reforma agraria.

Adanya bentuk bentuk perampasan ruang sosial yang pada akhirnya memunculkan suatu gerakan perlawanan pada akhirnya menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena ini. Hal tersebut dilakukan agar dapat melihat kontekstualisasi dari gerakan yang dilakukan oleh para petani perkebunan di sekitar wilayah PTPN 2 Simalingkar. Sehingga peneliti mampu mengkaji bentuk-bentuk kriminalisasi dan perampasan ruang hidup yang pada akhirnya memicu para petani untuk melakukan gerakan perlawanan. Serta juga memperkaya wawasan terkait dengan realitas gerakan sosial dalam menuntut agenda reforma agraria yang terjadi di era kontemporer saat ini khususnya di wilayah Simalingkar Deli Serdang Sumatera Utara

⁶ Prasetyo, H. 2013. "Sociology Of Space, sebuah bentangan teoritik". Universitas Negeri Malang. Hlm 64

Berdasarkan kasus tersebut, adanya gerakan petani yang dilakukan oleh petani Simalingkar dalam memperjuangkan hak nya merupakan bentuk problem politik. Oleh karena itu, penelitian akan mengangkat judul “Gerakan Petani Simalingkar Dalam Mendorong Program Reforma Agraria Di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara” untuk membedah kasus tersebut dengan studi Ilmu Politik. Hal tersebut bertujuan agar fenomena tersebut dapat diteliti guna mengembangkan studi Ilmu Politik serta menemukan solusi atas permasalahan politik atas fenomena gerakan sosial yang etrjadi di Simalingkar Deli Serdang Sumatera Utara tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas, dapat ditarik sebuah rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Apa motif dari para petani dalam melakukan gerakan tersebut?
2. Bagaimana para petani di Simalingkar Deli Serdang mengaplikasikan gerakannya dalam upaya melaksanakan tuntutan nya?
3. Bagaimana bentuk-bentuk perampasan lahan dan kriminalisasi yang dialami oleh para petani?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan sejarah dari muncul nya gerakan yang dilakukan oleh para petani di Simalingkar Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui penyebab dan juga motif dari adanya gerakan petani di Simalingkar Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perampasan lahan dan kriminalisasi yang dialami oleh para petani.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan studi ilmu politik khususnya pada kajian mengenai gerakan sosial.
2. Menjadi salah satu rujukan dalam kajian gerakan petani dalam melawan sistem alienasi yang ia alami guna mendapatkan hak-haknya sebagai petani yang harus mendapatkan keadilan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai wujud bersama perjuangan bersama dalam memperjuangkan kelompok petani yang ada di Simalingkar yang ingin mendapatkan hak-hak nya demi mewujudkan reforma agraria yang sesuai dengan cita-cita pembangunan bangsa. Sehingga mampu memberikan usulan kebijakan yang tepat terkait dengan percepatan implementasi dari reforma agrarian guna mewujudkan harapan yang disuarakan oleh para kaum petani yang ada di Simalingkar melalui gerakan yang dilakukan.

1.5 Kerangka Teoritik

1.5.1 Gerakan Sosial Baru

Secara umum, gerakan sosial merupakan bentuk tindakan kolektif yang dilakukan dengan nilai-nilai tujuan tertentu melalui aksi yang dilakukan. Tindakan kolektif tersebut dilakukan karena adanya tuntutan terhadap hak-hak yang belum terpenuhi yang mendorong kelompok yang melakukan gerakan tersebut untuk mendapatkan pemenuhan hak yang harus ia dapatkan. Seperti pengalaman pada peristiwa sengketa HGU antara petani dengan pihak PTPN II dimana petani melakukan gerakan secara kolektif agar para petani dapat dipenuhi tuntutannya merupakan bentuk dari gerakan sosial. Rajendra Sigh mendefenisikan gerakan sosial sebagai suatu aktivitas pengorganisasian yang mendorong setiap orang yang ada didalamnya untuk melakukan interaksi serta melakukan hubungan atas dasar

tujuan dan kepentingan anggota saat melakukan Tindakan gerakan sosial tersebut⁷. Interaksi dan hubungan yang dilakukan tersebut dilakukan melalui mekanisme pengorganisasian dalam suatu organisasi. Pengorganisasian tersebut bertujuan untuk menyatukan visi misi dari orang-orang yang ingin melakukan suatu gerakan tersebut guna menghasilkan kesepakatan kolektif agar gerakan tersebut menjadi solid.

Dalam gerakan sosial, pengorganisasian dan faktor leadership dari pemimpin gerakan menjadi faktor kunci dari keberhasilan gerakan. Sebab, penyatuan visi misi yang dilakukan melalui pengorganisasian akan memudahkan penyusunan setiap pertimbangan-pertimbangan penyaluran ide dan tuntutan melalui gerakan sosial. Hal tersebut akan menentukan aspek daya tahan dari suatu gerakan dalam melakukan perlawanan agar setiap tuntutan mampu terpenuhi secara kolektif. Karena setiap gerakan pastinya memiliki hambatan dan faktor ketahanan dari gerakan menjadi acuan keberhasilan dari gerakan sosial yang dilakukan.

Apabila digolongkan ke tiga model gerakan sosial, gerakan petani yang dilakukan oleh serikat petani Simalingkar tergolong kedalam model gerakan sosial baru. Pemetaan teoritik yang disampaikan oleh Rajendra Sigh, gerakan sosial baru merupakan perilaku kolektif dari masyarakat yang didasarkan pada pandangan yang bersifat kontemporer seperti nilai kemanusiaan dan hak-hak sosial politik⁸. Dalam gerakan sosial baru ini, budaya menjadi faktor solidaritas yang memperkuat solidaritas dari masyarakat dalam melakukan perlawanan melalui suatu gerakan sosial. gejala gerakan sosial baru tersebut juga terdapat pada gerakan yang dilakukan oleh serikat petani Simalingkar dalam memperjuangkan hak nya atas sengketa HGU PTPN II di Simalingkar tersebut. Pada fenomena tersebut dapat dilihat bahwa petani melakukan Tindakan kolektif untuk memperjuangkan hak politiknya atas kepemilikan lahan yang telah dipergunakan selama bertahun-tahun. Selain itu, gerakan serikat petani Simalingkar tersebut juga didasari pada budaya kaum tani yang memiliki rasa senasib dalam memperjuangkan hak-hak nya. Hal tersebut yang menjadikan gerakan yang dilakukan oleh serikat petani yang ada di

⁷ Sumana, Oman. 2016. "Konsep dan Teori Gerakan Sosial". (Malang). Intrans Publishing. hlm 1

⁸ Sigh, Rajendra. 2010. "Gerakan Sosial Baru". (Yogyakarta). Resist Book hlm 7

Simalingkar tergolong kedalam gerakan sosial baru sebagaimana didefinisikan oleh Rajendra Sigh tersebut.

Pada dasarnya, gerakan sosial baru adalah aktivitas kolektif dari sebagian ekstra institusional dengan anti institusional yang memiliki tujuan dalam mewujudkan suatu perubahan sosial. Dalam hal ini, nilai dan tujuan dari gerakan yang dilakukan adalah bersifat universal. Gerakan sosial yang dilakukan akan membawa kepada pembelaan terhadap hal-hal yang bersifat essential serta bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Hal tersebutlah yang kemudian diindikasikan oleh Rajendra Sigh sebagai suatu bentuk gerakan sosial baru yang mulai populer sejak decade taun 1960-an hingga saat ini⁹. Selain itu, adanya pergeseran kedalam paradigma baru dari Tindakan kolektif juga menjadi faktor dimana kebudayaan masyarakat membentuk suatu kesadaran baru bahwa membentuk suatu komunitas-komunitas adalah hal penting dalam menciptakan alternatif kebudayaan yang bermanfaat bagi masa depan masyarakat itu sendiri.

Selain itu, pemahaman yang diberikan oleh Tarrow juga mengatakan bahwa gerakan sosial baru sebagai bentuk tantangan kolektif yang prakarsai oleh beberapa kelompok yang memiliki solidaritas dan tujuan yang sama dalam konteks interaksi dengan kelompok penguasa, lawan maupun elite¹⁰. Pendapat Tarrow ini pada akhirnya memperkuat kontekstualisasi pandangan Sigh tentang sosial baru. Dalam hal ini, penjelasan Tarrow ini menjelaskan bahwa tindakan kolektif tersebut dilakukan dengan adanya polarisasi interaksi tertentu antara para pelaku gerakan dengan pihak lawan. Sehingga segala bentuk tuntutan tersebut dapat di dengarkan oleh pihak yang melakukan interaksi dengan para pelaku gerakan. Hal tersebut yang kemudian menjadi bentuk penguatan terhadap teori Sigh bahwa dalam gerakan sosial baru juga terdapat interaksi antar individu dan juga kelompok.

Adanya suatu bentuk pengorganisasian secara kolektif yang dilakukan oleh kelompok kepentingan tertentu merupakan bentuk dari gerakan sosial. Adanya tuntutan atas hak-hak sosial politik dan juga kemanusiaan menjadi pemahaman yang diberikan oleh Rajendra Sigh bahwa gerakan ini tergolong gerakan sosial baru. Dalam mengidentifikasi gerakan petani yang dilakukan oleh serikat petani

⁹ Ibid hlm 122-123

¹⁰ Tarrow, Sidney. 1998. "Social Movements And Contentious Politics". (London). Cambridge University Press. Hlm 49

yang ada di Simalingkar ini, penggunaan teori gerakan sosial baru akan dapat melihat kontekstualisasi atas gerakan petani tersebut beserta tuntutan-tuntutan yang berasal dari para petani. Adanya tuntutan atas redistribusi lahan dan juga pelaksanaan reforma agraria akan dilihat dalam kerangka gerakan sosial baru. Sehingga gerakan yang dilakukan oleh para petani ini dapat digolongkan sebagai suatu bentuk gerakan sosial baru melalui pemahaman yang dijelaskan dalam gerakan sosial baru ini.

Teori gerakan sosial baru ini sangat berbeda dengan gerakan sosial klasik. Apabila dilihat gerakan sosial klasik selalu berorientasi kepada perjuangan kelas, serta meneriakkan perjuangan anti terhadap kapitalisme. Hal tersebut berbeda dengan gerakan sosial baru yang sifatnya lebih plural dan memiliki kesesuaian dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di era kontemporer. Beberapa orientasi dari gerakan sosial baru diantaranya rasisme, feminisme, lingkungan, isu-isu perdamaian serta beberapa permasalahan kontemporer lainnya. Hal ini menjadikan gerakan sosial baru dipandang mampu dalam menginterpretasikan gerakan sosial yang terjadi di era saat ini karena memiliki kesesuaian terhadap permasalahan yang dialami oleh masyarakat.

Dalam pendefenisianannya, Rajendra Singh mendeskripsikan terdapat ciri-ciri ideal yang dimiliki oleh gerakan sosial baru. Beberapa dari ciri ideal tersebut menggambarkan kilas balik dari terjadinya gerakan sosial tersebut. Ciri-ciri ideal tersebut adalah sebagai berikut

- Dalam mayoritas kasus dari gerakan sosial baru, dasar asumsi yang selalu digunakan sebagai konsepsi ideologisnya adalah kondisi dimana masyarakat sipil yang digerogeti oleh hegemoni negara. Kondisi dimana negara dan juga pasar dipandang sebagai stakeholder yang selalu masuk secara paksa kedalam kehidupan masyarakat sipil. Gerakan sosial baru lahir atas kondisi tersebut sebagai bentuk pertahanan diri bagi masyarakat sipil melalui pembentukan komunitas dalam masyarakat agar dapat melawan ekspansi yang dilakukan negara dan juga pasar.
- Pada bentuk yang lebih radikal, gerakan sosial baru berusaha mengubah paradigma dari marxisme yang menadang bahwa konflik dan juga kontradiksi yang ada didalam masyarakat selalu dipandang sebagai bentuk perjuangan

kelas. Dalam hal ini, marxisme memandang bahwa pengelompokan manusia untuk suatu Tindakan kolektif merupakan bentuk dari perjuangan kelas. Sehingga pandangan dari gerakan sosial baru ini mematahkan tesis dari gerakan sosial lama dengan menganalisis bahwa fenomena kontemporer tidak hanya dalam bentuk perjuangan kelas saja melainkan dalam isu yang lebih pluralistic seperti feminisme, isu lingkungan dan permasalahan kontemporer lainnya.

- Gerakan sosial baru pada umumnya melibatkan masyarakat ditingkat akar rumput dalam melahirkan gerakan ditingkat mikro. Gerakan sosial baru akan melahirkan bentuk asosiasi-asosiasi yang bersifat demokratis terorganisir yang saling berkaitan satu sama lain baik ditingkat nasional maupun global. Gerakan sosial baru akan memusatkan perhatiannya pada bentuk-bentuk demoralisasi kehidupan yang akan membentuk suatu komunikasi dan identitas kolektif guna melawan demoralisasi tersebut. Kondisi ini akan menciptakan relasi baru antara negara dan juga masyarakat dalam menciptakan ruang public yang bebas serta kolektivitas dan identitas dalam masyarakat akan lebih mudah terawasi¹¹.

Gerakan sosial baru sejatinya mendefinisikan tujuan masyarakat yang sesuai dengan era kontemporer. Gerakan serikat petani Simlaingkar juga tergolong kedalam kondisi dimana terjadi ketidaksesuaian antara masyarakat dengan negara sehingga berujung kepada gejala demoralisasi. Hal tersebut haru dipandang sebagai suatu gejala serius bagi keberlangsungan relasi antara masyarakat dan juga negara. Sehingga tatanan masyarakat dapat lebih kat apabila relasi baru tercipta antara masyarakat dan juga negara.

1.5.2 Ruang Sosial

Ruang sosial merupakan sebuah teori yang dikeluarkan oleh Henry Levebre yang merupakan seorang Marxis. Ia mendasarkan asumsinya bahwa ruang merupakan produksi ruang sosial¹². Dalam hal ini, levebre meletakkan dasar

¹¹ Sigh, Rajendra. 2010. "Gerakan Sosial Baru". (Yogyakarta). Resist Book. hlm 129

¹² Levebre, H. 2009. "State, Space, Word". (Minneapolis). University Of Minnesota. Hlm 187

teoritisnya pada suatu konsep bahwa ruang bukan suatu hal yang bersifat netral atau tetap melainkan sesuatu hal yang telah diciptakan. Oleh karena itu Levebre mengilustrasikan bahwa ruang merupakan tempat dimana aktivitas produksi diciptakan oleh sistem yang kapitalistik¹³. Kondisi seperti inilah yang diilustrasikan Levebre yang mengutip argumentasi Marx bahwa dalam proses terbentuk ruang sosial akan ada masyarakat yang akan teralienasi akibat aktivitas produksi yang dilakukan oleh kaum kapitalis. Lebih lanjut, Levebre memfokuskan subjek dari pihak-pihak yang teralienasi tersebut pada buruh dan petani yang tersingkirkan akibat produksi kapitalistik tersebut.

Pandangan Levebre mengenai ruang dipandang sebagai suatu entitas yang abstrak yang secara terus menerus direproduksi oleh kalangan kapitalis. Adanya penetrasi kapital yang dilakukan oleh kalangan kapitalis menjadikan ruang hanya diisi oleh skema kepentingan yang disusun oleh kalangan kapitalis. Oleh karena itu, ruang tidak lagi menyediakan aktivitas manusia yang konkrit yang memperlihatkan realitas dari aktivitas kehidupan manusia, akan tetapi ruang merupakan aktivitas yang agenda didalamnya hanya diisi oleh kepentingan para pemodal saja (Kapitalis). Selain itu, Levebre juga merinci tentang beberapa kontradiksi yang terjadi atas produksi ruang-ruang abstrak yang dihasilkan oleh produk kapitalisme yang melahirkannya. Salah satu bentuk dari hilangnya ruang-ruang kebersamaan masyarakat tersebut adalah munculnya rezim hak milik. Pada konteks ini rezim hak milik merupakan bentuk dimana para kapitalis berupaya mempenetrasi ruang dengan kekuatan kapital yang ia miliki untuk dapat menguasai hajat hidup masyarakat didalamnya yang secara langsung berimplikasi kepada penghancuran ruang-ruang bersama masyarakat.

Adanya penguasaan secara sistematis terhadap ruang-ruang bersama yang dimiliki oleh masyarakat yang dilakukan oleh kalangan kapitalis ini berdampak pada lenyapnya ruang-ruang komunal yang sarat berisi aktivitas sosial antar sesama masyarakat. Apabila diilustrasikan dalam bentuk penelitian ini, gerakan perlawanan yang dilakukan oleh para petani di Simalingkar Deli Serdang ini juga terjadi atas terampasnya ruang hidup komunal dari kalangan petani yang dirampas secara paksa

¹³ Prasetyo, H. 2013. "Sociology Of Space, sebuah bentangan teoritik". Universitas Negeri Malang. Hlm 64

oleh pihak PTPN 2 selaku pemilik modal. Hal tersebut menjadikan ruang komunal yang seharusnya menjadi tempat bagi para petani dalam melakukan aktivitas komunal pada akhirnya terampas oleh kekuatan kapital yang dimiliki oleh perusahaan besar yang secara langsung melakukan penindasan terhadap para petani.

Pada konteks ruang, Levebre menjelaskan bahwa di era kapitalisme secara spasial ruang hanya menjadi arena pertarungan yang tidak akan pernah selesai diperebutkan¹⁴. Dalam hal ini, semua kelompok kepentingan yang hidup didalam ruang sosial masyarakat akan terus berupaya mencari cara untuk dapat melakukan penguasaan terhadap pemakaian serta pemanfaatan ruang hidup. Hal tersebut dilakukan agar kelompok kepentingan mampu untuk terus dapat melakukan hegemoni terhadap segala bentuk aktivitas yang terjadi dalam ruang sosial tersebut. Dengan kata lain, interaksi yang terjadi dalam suatu ruang sosial akan terus melakukan penyesuaian terhadap kepentingan kapital sehingga relasi antara kepentingan kapital dengan proses produksi yang terjadi dalam ruang sosial dapat terus bersifat kapitalistik. Hal tersebut secara langsung akan mempengaruhi mentalitas dari para penghuni ruang sosial sehingga ruang sosial akan selalu mereproduksi dirinya dan akan terus melakukan penyesuaian terhadap kepentingan kalangan kapitalistik.

Dalam konteks ini, Levebre menjelaskan bahwa ruang akan memiliki keterkaitan erat dengan "*Mode of production*" pada perkembangan masyarakat. Dalam hal ini ruang akan selalu memiliki keterkaitan erat dengan komoditas. Hal inilah yang menjadikan ruang sosial menjadi konstruksi yang bersifat esensial akibat perkembangan komoditas yang mengontrol komoditas dalam ruang sosial. Dengan kata lain, didalam ruang sosial kapitalisme telah menjelma menjadi "*Locus Production*" yang menempatkan bahwa komoditas yang merupakan aspek penting dalam ruang sosial akan terus berkembang seiring berkembang produksi ruang yang dilakukan oleh kapitalisme. Sebagai dampak, kapitalisme akan terus dapat mengontrol hegemoninya terhadap masyarakat yang merupakan bagian dari ruang

¹⁴ Pamungkas A S.. 2016. "Produksi Ruang Dan Revolusi Kaum Urban Menurut Henry Levebre". "<https://indoprogress.com/2016/01/produksi-ruang-dan-revolusi-kaum-urban-menurut-henri-lefevre/>.

akibat control atas komoditas yang dilakukan oleh kalangan kapitalis¹⁵. Hal tersebut berimplikasi kepada penguasaan pengetahuan terus direproduksi oleh kapitalis dalam ruang produksi yang secara langsung merampas ruang-ruang bersama dalam masyarakat.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Gerakan Petani

Secara umum, petani memiliki pengertian yaitu sebagai individu atau kelompok yang melakukan pengolahan lahan demi kepentingannya untuk memproduksi pangan dan nilai ekonomi lainnya. Posisi petani sebagai golongan atau pihak yang melakukan pengolahan lahan untuk memproduksi nilai ekonomi bagi dirinya akan menjadi suatu bentuk alienasi apabila petani tidak mendapatkan ruang hidup untuk melakukan pengolahan lahan. Adanya bentuk-bentuk aliansi terhadap petani inilah yang menjadikan para petani melakukan bentuk Tindakan kolektif melalui suatu gerakan petani. Hal tersebut dilakukan agar petani mampu menolak segala bentuk aliansi yang terjadi pada dirinya dan segala bentuk tuntutan yang ia harapkan dapat direalisasikan demi kesejahteraan petani tersebut. Sehingga tindakan kolektif yang dilakukan melalui gerakan petani yang dilakukan akan mendorong hilangnya proses-proses aliansi yang dialami oleh para petani.

Gerakan petani sebagai salah satu bentuk gerakan sosial merupakan bentuk gerakan yang telah ada sejak abad 19, dimana para petani melakukan Tindakan perlawanan atas dominasi elit dan juga kapital. Hal tersebutlah yang umumnya memunculkan gerakan petani sebagai suatu bentuk benturan antar kepentingan kelompok maupun golongan. Menurut Landsberger, terdapat 4 dimensi pada fenomena gerakan petani yaitu sebagai berikut. Pertama adanya perasaan tertindas yang dimiliki oleh individu untuk memperjuangkan setiap haknya, kedua Adanya Tindakan kolektif yang dilakukan oleh para petani melalui gerakan petani, ketiga Gerakan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang didasarkan pada kepentingan dari para petani, keempat bentuk-bentuk reaksi yang dimunculkan oleh

¹⁵ Ibid.

petani dalam melihat keberhasilan dari kepentingan yang ingin dicapai¹⁶. Keempat dimensi tersebut merupakan bentuk tingkat kesadaran dari gerakan petani yang memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan kepentingan atas setiap tuntutan yang ia miliki.

Berbagai macam bentuk gerakan petani ini merupakan bagian yang sama dengan teoritisasi Ranjendra Sigh yang kemudian disempurnakan Sigh kedalam gerakan sosial baru. Ia menjelaskan bahwa gerakan yang berfokus pada tujuan masyarakat yang bersifat kontemporer merupakan salah satu bagian dari gerakan sosial baru. Gerakan petani yang dilandasi karena adanya bentuk-bentuk perampasan hak atas kepemilikan tanah serta perasaan terindas merupakan gerakan sosial baru yang dilandasi bukan hanya atas dasar kepentingan kelas saja. Aspek lain diluar kepentingan kelas seperti penindasan, perampasan serta aliansi merupakan bentuk pemahaman konsep dari gerakan petani yang masuk kedalam kategori gerakan sosial baru yang memiliki alasan lebih dari sekedar kepentingan kelas saja.

Gerakan petani di era kontemporer lebih mengarah kepada pengambilan hak atas kepemilikan tanah yang dilakukan oleh para petani. Berdasarkan fenomena gerakan petani yang ada di banyak negara, perebutan kepemilikan tanah menjadi faktor utama munculnya gerakan petani untuk menuntut hak atas kepemilikan tanah tersebut¹⁷. Adanya upaya dominasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan diluar kelompok petani tersebut yang ingin mengambil alih kepemilikan lahan menjadikan para petani terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan kolektif. Apabila kepemilikan atas tanah kembali menjadi milik petani, maka hal tersebut secara langsung akan menaikkan martabat para petani yang selama ini telah mengalami proses aliansi didalam masyarakat. Analisa inilah yang menjadikan fenomena gerakan serikat petani Simalingkar menjadi bentuk gerakan yang berupaya untuk mengambil alih kepemilikan lahan yang selama bertahun-tahun telah dikelola oleh petani dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

1.6.2 Ruang Representasi

¹⁶ Landsberger, H dan Yu Alexandrov. 1984. "Gerakan Petani Dan Perubahan Sosial". (Jakarta). CV Rajawali. Hlm 24-25

¹⁷ Ibid. hlm 108

Secara umum, ruang representasi merupakan keseluruhan tempat aktivitas dari individu ataupun kelompok dalam mempengaruhi dan melakukan interaksi satu sama lain dalam konteks ruang. Adanya fenomena dari gerakan petani yang diakibatkan karena adanya fenomena terampasnya hak-hak dari para petani dalam melakukan aktifitas ekonomi dengan penggunaan lahan menjadikan para petani terdorong untuk melakukan tindakan kolektif agar mereka mampu menggunakan lahan tersebut guna memproduksi pangan dan aktivitas ekonomi lainnya. Selain itu, ruang erat kaitannya dengan produksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dengan produksi pengetahuan dari masyarakat itu sendiri, sehingga ruang representasi menunjukkan refleksi yang erat dari kedua hal tersebut¹⁸. Sehingga ruang menjadi hal terpenting dalam menunjang setiap aktivitas bagi individu dan masyarakat. Akan tetapi, problem muncul ketika pengetahuan mendominasi aktivitas masyarakat. Hal inilah yang kemudian akan memunculkan hegemoni seperti yang dialami oleh para petani dimana para petani dihegemoni dengan dominasi pengetahuan khususnya terkait dengan penguasaan lahan dan ruang hidup.

Secara defenitif, Henry levebre memberikan pandangan bahwa pola-pola produksi ekonomi dan pengetahuan yang terjadi dalam aktivitas keruangan memunculkan bentuk representasi ruang dalam masyarakat tersebut¹⁹. Bentuk representasi ruang yang didefenisikan Levebre ini merujuk kepada adanya pola atau nilai produksi tertentu yang dipaksakan untuk untuk dipakai dalam aktivitas ruang tersebut. Hal tersebut tercermin dalam gerakan petani yang dilakukan serikat petani Simalingkar, dimana para petani berusaha untuk melawan suatu nilai tertentu yang dipaksakan terhadap dirinya atas penguasaan lahan guna mewujudkan kepentingan dari para petani tersebut. Sehingga segala bentuk pendominasian tersebut memunculkan tindakan perlawanan dari kalangan petani guna mewujudkan tujuan bersama yaitu reforma agraria. Hal tersebut menjadikan ruang sangat erat kaitannya dengan relasi sosial antar kelompok-kelompok kepentingan yang ada didalam masyarakat.

¹⁸ Pamungkas A S.. 2016. "Produksi Ruang Dan Revolusi Kaum Urban Menurut Henry Levevre". "<https://indoprogress.com/2016/01/produksi-ruang-dan-revolusi-kaum-urban-menurut-henri-lefevre/>". (Diakses Pada 31 Oktober 2021)

¹⁹ Ibid.

Dalam konsepnya, pemahaman ruang yang dijelaskan oleh Levebre menganut pada pandangan yang lebih Marxis. Pada penjelasannya, ruang didefinisikan sebagai entitas yang abstrak sehingga ruang tidak lagi menjadi sesuatu hal yang konkrit melainkan hanya menjadi rancangan atas kepentingan tertentu yang membawa kepada kepentingan modal dibelakangnya yang secara langsung menjadikan ruang dikuasai golongan kepentingan tertentu saja. Adanya fenomena ruang abstrak ini pada akhirnya akan menghilangkan ruang-ruang bersama dan pada akhirnya ruang tersebut dikuasai oleh rezim hak milik. Hal tersebut menimbulkan problem pada praktek spasial yang seharusnya terdapat interaksi dan kepemilikan ruang secara bersama-sama. Penjelasan ini sangat relevan dengan kondisi yang dialami oleh para petani yang ada di Simalingkar. Terjadinya penguasaan ruang hidup oleh rezim hak milik dan juga korporasi dalam hal ini PTPN 2 secara menyeluruh menimbulkan suatu kontradiksi terhadap praktek-praktek spasial yang harus dimiliki. Tuntutan mengenai reforma agrarian yang dilayangkan oleh petani menjadi tidak efektif akibat penguasaan tanah dan juga proses aliansi yang dilakukan oleh pihak PTPN 2 menjadikan para petani melakukan gerakan petani untuk melawan. Sehingga, gerakan petani tersebut dapat melawan penguasaan oleh rezim hak milik atas tanah yang telah puluhan tahun dimiliki secara resmi oleh masyarakat dan telah digunakan sebagai ruang hidup bagi para petani yang ada di Simalingkar sebagai suatu bentuk interaksi mereka dalam ruang.

Peran ruang sebagai tempat aktivitas dari masyarakat memiliki peran yang sangat urgensial khususnya bagi para petani. Munculnya gerakan-gerakan tindakan perlawanan dari golongan kelas bawah seperti petani menjadikan ruang hanya dimiliki oleh Sebagian kelompok kepentingannya. Dalam hal ini, problem penguasaan dan perampasan tanah tanpa penyelesaian yang substantif menjadikan ruang hidup yang dimiliki oleh para petani semakin terampas dan terancam pemenuhan kebutuhan ekonominya. Oleh karena itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Levebre bahwa ruang harus mampu memberikan nilai dan ketentuan yang ditetapkan bersama guna menjadi acuan dalam menjalankan aktivitas. Penetapan nilai-nilai aktivitas sosial ekonomi secara bersama-sama akan menekan perkembangan gerakan penolakan dari masyarakat. Sehingga gerakan penolakan

harus dimaknai sebagai bentuk adanya fenomena nilai-nilai aktivitas sosial ekonomi yang ditetapkan oleh kelompok kepentingan tertentu dan hal tersebut memunculkan tindakan perlawanan karena para petani merasa terampas ruang hidupnya.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat prosedur yang digunakan untuk memahami bentuk dari permasalahan yang akan diteliti serta cara pengolahan data yang didapatkan untuk menganalisis fenomena gerakan serikat petani Simalingkar ini. Sehingga metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ada metode kualitatif fenomenologi. Metode ini akan memungkinkan peneliti menganalisis permasalahan yang sedang diteliti dengan mendasarkan pada pengalaman dari aktor kejadian dan juga kenyataan empiris yang secara terjadi dilapangan. Sehingga, peneliti mampu mendapatkan serta memproses data secara akurat karena didasarkan pada kenyataan fenomena yang terjadi pada permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam metode penelitian kualitatif fenomenologi menggunakan prinsip pendekatan fenomenologi. Beberapa prinsip tersebut diantaranya mengacu kepada kenyataan dan dapat memahami peristiwa serta keterkaitannya terhadap orang-orang yang ada didalam situasi tertentu. Hal ini mengakibatkan pendekatan fenomenologi cenderung akan menginterpretasikan kehidupan atau peristiwa yang dialami oleh seseorang berdasarkan pengalaman hidup partisipan dari fenomena tersebut²⁰. Sehingga penelitian yang dihasilkan dapat memberikan kajian komprehensif atas interpretasi suatu peristiwa secara akurat dan memiliki standar nilai yang tinggi.

Selain itu metode penelitian kualitatif fenomenologi ini akan digunakan untuk mengungkap permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan mengungkap esensi dari suatu fenomena dengan konsep yang dipahami. Dengan demikian, peneliti akan dapat memperoleh permasalahan yang akan dianalisis dengan

²⁰ Mujib, Abdul. 2015. "Pendekatan Fenomenologi Dalam Studi Islam". *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6 . Hlm. 167-163

mendasarkan diri pada kenyataan fenomena yang berasal dari informan individu atau kelompok secara sadar. Oleh karena itu, kualitatif fenomenologi sejatinya berfokus kepada pengalaman hidup yang dirasakan oleh informan langsung dalam rangka mengungkap kesamaan makna dari konsep atau fenomena tertentu.

1.7.1 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada motif dan juga penyebab dari munculnya gerakan petani yang dilakukan oleh serikat petani Simalingkar. Dalam konteks ini, petani Simalingkar merasakan bahwa implementasi reforma agraria belum dirasakan oleh para petani dalam penyelesaian kasus sengketa agraria pada HGU PTPN II yang ada di Simalingkar. Adanya rasa kekecewaan yang dialami oleh para petani yang ada di Simalingkar akibat alienasi yang ia alami menjadikan gerakan ini timbul sebagai bentuk perlawanan dari kelompok petani. Program reforma agraria yang seharusnya bertujuan untuk memberi solusi atas masalah agraria yang dialami petani, dalam hal ini tidak dirasakan oleh petani yang ada di Simalingkar. Masalah penyelesaian sengketa eks-HGU PTPN II tak kunjung diselesaikan oleh para otoritas penguasa setempat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akhirnya akan berfokus kepada motif dari munculnya gerakan petani tersebut dan juga proses-proses politik yang dialami oleh para petani dalam melakukan gerakan tersebut. Sehingga peneliti mampu menemukan data yang akurat dan juga tepat.

1.7.2 Tipe Penelitian

Pada penelitian yang membahas tentang gerakan petani yang dilakukan oleh serikat petani Simalingkar ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi. Menurut Lexy, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mempergunakan Teknik wawancara terbuka untuk dapat mengetahui setiap perilaku, sikap, dan perasaan dari individu atau masyarakat yang menjadi aktor

dalam permasalahan yang hendak diteliti²¹. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan instrument kunci penelitian seperti pengumpulan data gabungan, analisis data dan melakukan pemaknaan terhadap setiap data yang didapatkan. Berdasarkan pemahaman tersebut, metode kualitatif fenomenologi harus mendasarkan analisis berdasarkan wawancara dengan aktor yang nyata dan juga berdasarkan fenomena yang empiris. Sehingga data-data yang didapatkan lebih akurat dan dapat dianalisa dengan teknik penelitian yang tersedia.

1.7.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian memiliki makna sebagai informan ataupun narasumber yang menjadi aktor atau figure dalam suatu permasalahan yang diangkat. Subyek penelitian akan memberikan data-data empiris berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan sesuai dengan pengalaman yang dimiliki oleh aktor atau figure dari permasalahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa subyek penelitian yang dapat memberikan informasi untuk membedah permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Kepala Desa Simalingkar

Sebagai pihak yang mewakili aparaturnya desa yang ada di desa Simalingkar. Kepala desa Simalingkar dapat memberikan keterangan terkait latar belakang terjadinya gerakan serikat petani yang ada di Simalingkar. Peran kepala desa memiliki peranan penting, karena kepala desa merupakan penguasa yang ada di desa tersebut dan secara langsung juga memahami kemunculan serikat petani dalam melakukan gerakan tuntutan reforma agraria dalam penyelesaian sengketa lahan yang dialami oleh para petani yang ada di Simalingkar.

2. Konsorsium Pembaharuan Agraria Sumatera Utara (KPA SUMUT)

Konsorsium pembaharuan agraria wilayah Sumatera Utara memegang peranan penting sebagai pihak yang membantu advokasi dan juga pendamping dari para petani untuk dapat mencapai reforma agraria dalam penyelesaian sengketa

²¹ Moleong, Lexy. 2017. "Metodologi Penelitian Kualitatif". (Bandung). PT Remaja Rodakarya. hlm 5

HGU atas kepemilikan tanah. Oleh karena itu, pihak KPA Sumut sebagai bagian dari tim advokasi Gerakan para petani dapat memberikan beberapa informasi mengenai mobilisasi gerakan yang dilakukan oleh petani. Sehingga KPA SUMUT dapat memberikan informasi terkait dengan indikator keberhasilan dari Gerakan petani yang dilakukan oleh serikat petani yang ada di Simalingkar.

3. Ketua Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB)

Gerakan yang dilakukan dengan mobilisasi masa tidak akan lepas dari peran aktor pemimpin dari gerakan serikat petani tersebut. Ketua serikat petani bertanggung jawab sebagai koordinator dalam menyusun strategi gerakan yang dilakukan oleh kaum petani dan juga sebagai penanggung jawab atas gerakan penolakan yang dilakukan oleh serikat petani. Sehingga ketua serikat petani memiliki peran yang sangat besar, sehingga dapat mengetahui setiap kronologis atas fenomena gerakan petani yang dilakukan oleh para petani yang ada di Simalingkar.

4. Petani/Anggota Serikat Petani Simalingkar Bersatu

Petani merupakan subyek utama dalam permasalahan yang akan diteliti. Petani semakin pihak yang merasakan langsung proses subordinasi dan alienasi terhadap dirinya menjadikan petani memiliki pengalaman atas kejadian yang menimpa dirinya secara langsung. Petani akan dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang realitas sebenarnya yang terjadi pada pergerakan yang dilakukan oleh para petani Simalingkar dalam menuntut hak pada perebutan lahan tersebut. Sehingga petani menjadi informan yang sangat penting dalam penelitian ini.

1.7.4 Unit Analisis

Pada penelitian ini terdapat beberapa tahapan dalam proses pengumpulan data yang akan menjadi tahapan didalam Bab III penelitian ini. Selanjutnya, seluruh unit analisis tersebut akan menjadi variabel data yang akan digunakan dalam proses pengolahan data. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul “Gerakan Serikat Petani

Simalingkar Dalam mendukung Program Reforma Agraria Di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara” ini tergolong kedalam penelitian yang dimasukkan kedalam sudut pandang gerakan sosial.

Berdasarkan pemahaman yang dimiliki oleh peneliti tersebut, terdapat beberapa kriteria informan maupun narasumber yang ditetapkan peneliti sebagai pihak yang terlibat dalam setiap proses dari gerakan petani yang ada di Simalingkar tersebut. Adapun beberapa kriteria tersebut yaitu sebagai berikut.

A. Narasumber/Informan baik individu atau kelompok yang terlibat dalam gerakan petani yang ada di Simalingkar tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Narasumber tersebut terdiri dari para petani Simalingkar Deli Serdang dan pihak serikat petani simalingkar Bersatu (SPSB).

B. Narasumber/Informan yang berasal dari institusi-institusi yang terlibat ataupun mengetahui situasi dari perkembangan gerakan petani yang ada di Simalingkar. Narasumber yang berasal dari institusi resmi tersebut adalah dari pihak konsorsium pembaharuan agrarian wilayah Sumatera Utara dan juga pemerintah desa Simalingkar B.

1.7.5 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan mengambil lokasi penelitian di Desa Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Pada lokasi tersebut terdapat sekitar 850 hektar tanah yang diperebutkan oleh petani dan juga lokasi tersebut menjadi tempat fenomena penggusuran, kriminalisasi dan pusat gerakan petani dari serikat petani yang ada di Simalingkar. Selain itu, wilayah tersebut dijadikan pusat yang diklaim oleh para petani yang ada di Simalingkar sebagai “Tanah perjuangan serikat petani Simalingkar Bersatu”. Sehingga wilayah tersebut menjadi fokus lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini.

1.7.6 Instrumen Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, instrument yang digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu menggunakan pedoman wawancara atau observasi. Instrumen ini akan digunakan saat proses wawancara yang dilakukan terhadap narasumber atau informan guna memberikan informasi akurat terkait keadaan gerakan petani yang dilakukan oleh serikat petani yang ada di Simalingkar. Dengan demikian, data yang diperoleh akan sesuai dengan kenyataan terhadap fenomena yang ada di lapangan dan instrument ini sesuai dengan metode penelitian yang yang digunakan yaitu didasarkan pada fenomena yang ada di lokasi penelitian.

Pedoman wawancara akan mewawancarai informan secara langsung yang merupakan pelaku maupun orang yang mengetahui permasalahan pada penelitian ini guna mendapat data akurat. Selanjutnya, observasi juga akan digunakan dalam instrument pengumpulan data. Observasi ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian akan peneliti mampu mengetahui secara pasti bagaimana permasalahan yang terjadi agar sesuai dengan kenyataan empiris.

1.7.7 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang akan menjadi cara dalam mendapatkan data-data yang komprehensif guna mendukung hasil dari penelitian. Dalam penelitian ini, model data primer dan studi pustaka akan digunakan dalam mendapatkan data penelitian ini yang terdiri dari.

1. Wawancara: Model ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil data-data secara langsung melalui narasumber dan informan penelitian. Hal tersebut dilakukan dengan wawancara terbuka dengan informan, sehingga informan dapat memberikan informasi valid mengenai permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini.
2. Observasi: Model ini merupakan melakukan pemahaman atas kondisi yang terjadi dilapangan sehingga peneliti dapat memahami kenyataan empiris yang terjadi pada gerakan petani yang dilakukan oleh serikat petani Simalingkar tersebut.

3. Studi Pustaka: Model ini merupakan pencarian data data yang bersumber dari penelitian terdahulu, artikel, berita dsb guna mendukung data primer yang didapat dalam penelitian ini.

1.7.8 Teknik Analisa Data

Dalam melakukan Analisa data didalam penelitian kualitatif menggunakan 3 teknik yaitu reduksi data, penyajian data dan terakhir membuat kesimpulan²². Pertama, reduksi data merupakan perangkuman data-data yang didapatkan sehingga data tersebut dapat dirincikan dengan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang komprehensif mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kedua, penyajian data merupakan teknik yang dilakukan dengan menghadirkan klasterisasi baik berupa tabel atau grafik berdasarkan data yang telah dirangkum dengan menekankan sisi tektual naratif dari hasil rangkuman tersebut. Terakhir, Kesimpulan merupakan teknik untuk memverifikasi data-data yang telah dirangkum dan diklasterisasi sehingga menghasilkan data penelitian yang komprehensif guna menghasilkan penelitian yang didasarkan pada data-data empiris. Data yang dihasilkan tersebut akan diperoleh dengan menggunakan analisis pada transkrip wawancara yang telah diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan.

²² Sugiyono. 2016. "Memahami Penelitian Kualitatif". (Bandung). Alfabeta. hlm 91